

**Pengaruh Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus
Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan,
Lingkungan Sosial, dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan**

SKRIPSI

OLEH



ADI GUNAWAN
Nim. 10873003231



PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013

**Pengaruh Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus
Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan,
Lingkungan Sosial, dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*

OLEH

ADI GUNAWAN
Nim. 10873003231



PROGRAM S.1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

“PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, LINGKUNGAN SOSIAL DAN SANKSI PERPAJAKDALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN ”

Oleh :

ADI GUNAWAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan antara Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Lingkungan Sosial dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pengambilan sampel yang berjumlah 100 orang dilakukan dengan metode probability sampling. Analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data tersebut dianalisis menggunakan program SPSS 16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, Lingkungan Sosial dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel Perpsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $(2,279) > t$ tabel $(1,986)$ untuk variabel Tingkat Penghasilan, nilai t hitung $(1,067) < t$ tabel $(1,986)$ untuk variabel Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, nilai t hitung $(2,121) > t$ tabel $(1,986)$ untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, nilai t hitung $(0,656) < t$ tabel $(1,986)$ untuk variabel Tingkat Pendidikan, nilai t hitung $(4,598) > t$ tabel $(1,986)$ untuk variabel Lingkungan Sosial, dan nilai t hitung $(2,072) > t$ tabel $(1,986)$ untuk variabel Sanksi Perpajakan. Sedangkan secara simultan variabel Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Lingkungan Sosial, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung $(12,861) > F$ tabel $(2,198)$.

Kata kunci :Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Lingkungan Sosial, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas selesainya tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di permukaan bumi ini.

Penulis menyadari tanpa adanya ridho dari Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Lingkungan Sosial dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan” Untuk itu penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dony Martias, SE. MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Kedua orang tua penulis Ayahanda M. Syargawi dan Ibunda Maimunah tersayang, serta seluruh saudara-saudara penulis tercinta Jhoni, Emelya Tuti, Zulham dan Della. Buat si nakal Iqbal dan si imut Acha mudah-mudahan cepat bisa lari, dan juga buat adek Ellen terimakasih untuk bantuannya selama ini, baik itu berupa bantuan moril maupun bantuan materil, serta do'anya yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis. Sampai kapanpun semuanya takkan bisa terbalaskan.
5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Penasehat Akademis (PA) penulis, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Ibu Febri Rahmi selaku dosen konsultasi proposal dan juga Bapak Andri Novius selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seseorang dan teman penulis Indra Rukmana, Darmawi, Syamsul Bahri, Novi Rahmawati, Khadijah, Titik Tasmoyo Putri, dan Miftahul Jannah, karna bersama kalian perjalanan kita menjadi mudah dan menyenangkan.
8. Teman seperjuangan Akn-A dan semua teman-teman sekelas Konsentarsi Ak_Perpajakan “angkatan 2008” yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do'anya yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah-Nya atas apa yang telah diberikan kepada penulis serta mendapat balasan yang setimpal dengan amal. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 24 September 2013

Adi Gunawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DATAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pemahaman Perpajakan	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	10
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.4. Azas Pemungutan Pajak	13
2.1.5. Tatacara Pemungutan Pajak	13
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.3. Pajak Dalam Pandangan Islam	16
2.4. Penelitian Terdahulu	18
2.5. Pengembangan Hipotesis	36
2.5.1. Tingkat Penghasilan	20
2.5.2. Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	21
2.5.3. Pengetahuan Perpajakan	22
2.5.4. Tingkat Pendidikan	24
2.5.5. Lingkungan Sosial	25
2.5.6. Sanksi Perpajakan	27
2.6. Model Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	30
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.2.1. Populasi	30
3.2.2. Sampel	30
3.3. Jenis Penelitian dan Sumber Data	43

3.3.1. Data Primer	32
3.3.2. Data Sekunder	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Defenisi Variabel dan Pengukuran Variabel Operasional	34
3.5.1. Variabel Dependen	35
3.5.2. Variabel Independen	35
3.6. Metode Analisis Data.....	39
3.6.1. Uji Validitas dan Reabilitas Data.....	39
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	40
3.6.3. Uji Hipotesis	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi dan Analisis Data.....	45
4.2. Analisis Data	48
4.2.1. Analisis Uji Kualitas Data	48
4.2.2. Analisis Uji Asumsi Klasik.....	51
a. Analisis Uji Normalitas	51
b. Analisis Uji Multikolinearitas	54
c. Analisis Uji Heterokedastisitas	55
d. Analisis Uji Autokorelasi.....	56
4.2.4. Analisis Hipotesis	57
a. Uji Regresi Secara Parsial	59
b. Uji Regresi Secara Simultan	61
c. Uji Korelasi Ganda (R).....	62
d. Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.3. Pembahasan	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

LAMPIRAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi dan Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan penyebaran kuisisioner kepada responden yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kuisisioner disebar dengan cara memberikan langsung kepada responden masyarakat yang sedang melakukan pengurusan administrasi perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Setelah kuisisioner ini diisi oleh responden, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasi dan diolah dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) Versi 16,0. Penyebaran kuisisioner dimulai tanggal 2 September 2013 sampai tanggal 9 September 2013.

Jumlah kuisisioner yang diedarkan kepada responden adalah sebanyak 100 kuisisioner. Kuisisioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 100 kuisisioner, semua kuisisioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 100 kuisisioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuisisioner

KETERANGAN	Total
Total kuisisioner yang disebar	100
Total kuisisioner yang terkumpul kembali	100
Total kuisisioner yang dapat di olah	100
Persentase pengembalian kuisisioner (92/92 x 100%)	100%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 100 kuisioner. Kuisioner yang terkumpul kembali sebanyak 100 kuisioner atau 100%. Jadi, total kuisioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuisioner yang disebarkan adalah 100 kuisioner atau 100%.

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Profil Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentasi
Jenis Kelamin		
a. Pria	43	43%
b. Wanita	57	57%
Umur		
a. 21- 30 tahun	62	62%
b. 31 - 40 tahun	36	36%
c. > 40 tahun	2	2%
Pendapatan perbulan :		
a. 5 - 25 juta	92	92%
b. 26 – 50 juta	5	5%
c. 51- 250 juta	3	3%
d. 250- 500 juta	-	
e. >500 juta	-	
Pendidikan terakhir :		
a. SD/Sederajat	0	0
b. SMP/ Sederajat	0	0
c. SMA/Sederajat	34	34%
d. S1/Sederajat	66	66%
Jenis pekerjaan :		
a. Perdagangan	48	48%
b. Jasa	52	52%

Sumber : Data olahan

Tabel IV.2 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 43 orang atau 43% dan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 57 orang atau 57%. Responden yang memiliki umur 21- 30 tahun adalah 62 orang atau 62% , umur 31 - 40 tahun adalah 36 atau 36% dan umur > 40 tahun adalah 2 orang atau 2%. Mayoritas responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 66 orang atau 66% , responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 34 orang atau 34%, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 0% dan SD sebanyak 0%. Jenis pekerjaan yang di miliki responden perdagangan sebanyak 48 orang atau 48% , dan jasa sebanyak 52 orang atau 52%.

Analisis data dilakukan terhadap 100 sampel responden yang memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistic deskriptif ditunjukkan pada tabel VI.3 dibawah ini :

Tabel VI.3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Penghasilan	100	3	15	12.31	1.973
Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	100	4	15	9.58	2.519
Pengetahuan Perpajakan	100	10	20	16.23	2.122
Tingkat Pendidikan	100	6	15	12.38	1.588
Lingkungan Sosial	100	8	20	15.63	2.541
Sanksi Pajak	100	8	20	17.00	2.220
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	15	12.37	1.715
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 16.

Berdasarkan tabel VI.7 terlihat bahwa nilai jawaban semua responden terhadap tingkat penghasilan mempunyai nilai rata-rata sebesar 12,31, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional mempunyai nilai rata-rata sebesar 9,58, pengetahuan perpajakan mempunyai nilai rata-rata sebesar 16,23, tingkat pendidikan mempunyai nilai rata-rata sebesar 12,38, lingkungan sosial mempunyai nilai rata-rata sebesar 15,63, sanksi pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 17,00, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai rata-rata 12,37.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing scor item dengan scor total. Scor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan scor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Dan dalam uji validitas yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja.

Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai Pearson Korelasi lebih besar dari nilai r tabel untuk 100 responden dengan signifikansi 0,05 yaitu $df=(n-2)=98$ yaitu sebesar 0,1966. Untuk variable independen dan dependen, dari hasil uji validitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlatic	Kesimpulan
	Tingkat Penghasilan (X1)	Q1	0,755	Valid
		Q2	0,764	Valid
		Q3	0,736	Valid
	Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X2)	Q4	0,793	Valid
		Q5	0,848	Valid
		Q6	0,800	Valid
	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Q7	0,634	Valid
		Q8	0,709	Valid
		Q9	0,562	Valid
		Q10	0,785	Valid
	Tingkat Pendidikan (X4)	Q11	0,781	Valid
		Q12	0,734	Valid
		Q13	0,731	Valid
	Lingkungan Sosial (X5)	Q14	0,784	Valid
		Q15	0,766	Valid
		Q16	0,764	Valid
		Q17	0,781	Valid
	Sanksi Pajak (X6)	Q18	0,774	Valid
		Q19	0,882	Valid
		Q20	0,770	Valid
		Q21	0,708	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Q22	0,817	Valid
		Q23	0,781	Valid
		Q24	0,741	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 16.

Dari tabel VI.4 dapat dijelaskan bahwa yang mempengaruhi kemauan membayar pajak diukur dengan 24 item pertanyaan yang terdiri dari :

- 1) Tingkat penghasilan diukur dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,736, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 2) Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional diukur dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi

yang terendah yaitu 0,793, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.

- 3) Pengetahuan perpajakan diukur dengan 4 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,562, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 4) Tingkat pendidikan diukur dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,731, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 5) Lingkungan sosial diukur dengan 4 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,764, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 6) Sanksi Pajak diukur dengan 4 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,708, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.
- 7) Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,741, artinya semua item pertanyaan diatas 0,1966 dan memenuhi syarat untuk valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel VI.5 dibawah ini:

Tabel IV.5 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Jumlah Item Pertanyaan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Tingkat Penghasilan (X1)	3	0,611	Reliabel
2	Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X2)	3	0,742	Reliabel
3	Pengetahuan Perpajakan (X3)	4	0,602	Reliabel
4	Tingkat Pendidikan (X4)	3	0,616	Reliabel
5	Lingkungan Sosial (X5)	4	0,776	Reliabel
6	Sanksi Pajak (X6)	4	0,769	Reliabel
7	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3	0,676	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS

Hasil pengujian reabilitas yang disajikan paada tabel VI.5 menunjukkan tidak ada koefisien *Cronbach Alpha* yang kurang dari 0,60. Sehingga instrument tersebut reliable untuk digunakan.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variable independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan *one sampel kolmogorov smirnov test* dengan melihat signifikan 5 %. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data mempunyai distribusi tidak normal.

Uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
	Tingkat Penghasilan	Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	Pengetahuan Perpajakan	Tingkat Pendidikan	Lingkungan Sosial	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
N	100	100	100	100	100	100	100
Normal Parameters ^a							
Mean	12.31	9.58	16.23	12.38	15.63	17.00	12.37
Std. Deviation	1.973	2.519	2.122	1.588	2.541	2.220	1.715
Most Extreme Differences							
Absolute	.178	.125	.167	.235	.158	.166	.185
Positive	.086	.125	.113	.185	.076	.110	.135
Negative	-.178	-.082	-.167	-.235	-.158	-.166	-.185
Kolmogorov-Smirnov Z	1.776	1.247	1.668	2.354	1.579	1.662	1.846
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004	.089	.008	.000	.014	.008	.002

a. Test distribution is Normal.

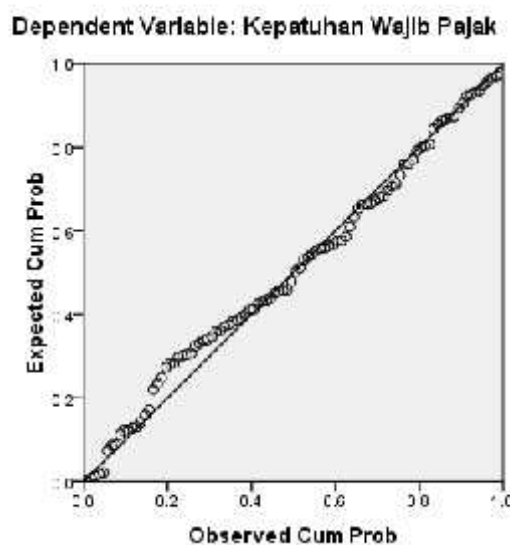
Sumber: Output SPSS 16

Tabel IV.6 menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel tingkat penghasilan adalah sebesar 1,776 dengan signifikansi sebesar 0,004. Nilai K-S-Z untuk variabel persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional adalah sebesar 1,247 dengan signifikansi sebesar 0,089. Nilai K-S-Z untuk variabel pengetahuan perpajakan

adalah sebesar 1,668 dengan signifikansi sebesar 0,008, nilai K-S-Z untuk variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 2,354 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai K-S-Z untuk variabel lingkungan sosial adalah sebesar 1,579 dengan signifikansi sebesar 0,014. Nilai K-S-Z untuk variabel sanksi pajak adalah sebesar 1,662 dengan signifikansi sebesar 0,008. Nilai K-S-Z semua variabel tersebut diatas 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Deteksi normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1 Diagram P-P Plot Normalitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output SPSS 16.

Pada gambar terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati besaran *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika VIF lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variable bebas lainnya. Besarnya VIF dan *tolerance* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Nilai tolerance dan VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tingkat Penghasilan	.686	1.458
	Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	.968	1.033
	Pengetahuan Perpajakan	.630	1.587
	Tingkat Pendidikan	.866	1.155
	Lingkungan Sosial	.840	1.190
	Sanksi Pajak	.946	1.057

Sumber: Output SPSS 16

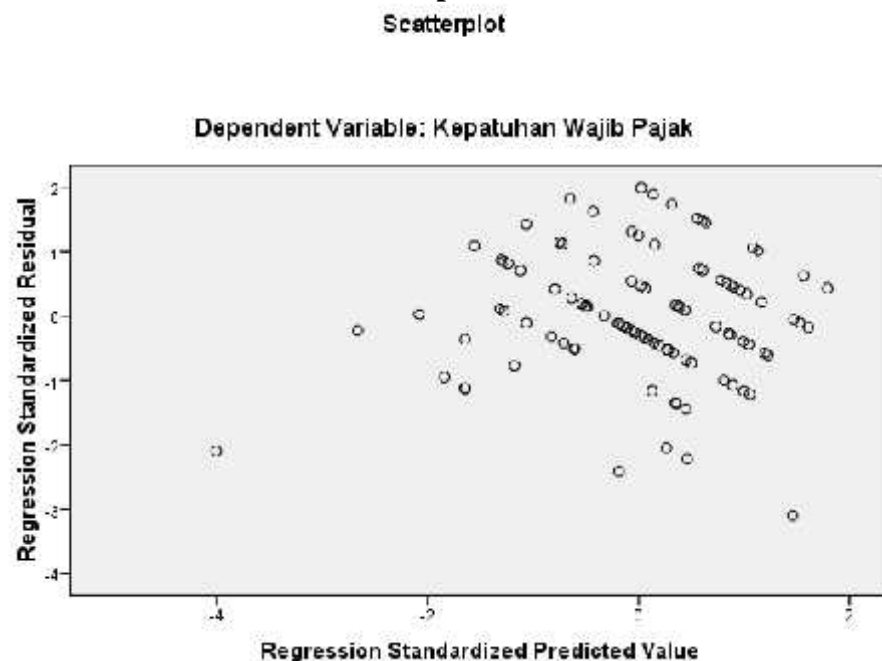
Dari tabel IV.7 menunjukkan variable tingkat penghasilan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,686 sedangkan nilai VIF 1,458, variabel persepsi

pelaksanaan sensus pajak nasional mempunyai nilai tolerance sebesar 0,968 sedangkan nilai VIF 1,033, variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,630 sedangkan nilai VIF 1,587, tingkat pendidikan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,866 sedangkan nilai VIF 1,155, variabel lingkungan sosial mempunyai nilai tolerance sebesar 0,840 sedangkan nilai VIF 1,190, variabel sanksi pajak mempunyai nilai tolerance sebesar 0,946 sedangkan nilai VIF 1,057. Dari semua variabel independen tidak ada nilai VIF diatas 10, berarti tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini penelitian ini bebas dari gangguan multikolinearitas dan layak digunakan.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar V.2.

Gambar IV.2 Scatterplot Heteroskedastitas



Sumber: Output SPSS 16

Pada gambar IV.2 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidak nya autokorelasi dengan mendeteksi besaran *Durbin-Watson*. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka *Durbin-Watson*. Secara umum bisa diambil patokan :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada Autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.673 ^a	.453	.418	1.308	1.801

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 16

Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai statistik *Durbin-watson* sebesar 1,801. Angka *Durbin-Watson* dibawah 2 yaitu sebesar 1,801 yang berarti tidak

ada autokorelasi. Dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas dari autokorelasi.

4.2.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 16.0, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen. Hasil regresi seperti yang tercantum dalam Tabel IV.9.

Tabel IV.9. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.042	1.676		-.025	.980		
Tingkat Penghasilan	.183	.080	.211	2.279	.025	.686	1.458
Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	.057	.053	.083	1.067	.289	.968	1.033
Pengetahuan Perpajakan	.166	.078	.205	2.121	.037	.630	1.587
Tingkat Pendidikan	.058	.089	.054	.656	.514	.866	1.155
Lingkungan Sosial	.260	.056	.385	4.598	.000	.840	1.190
Sanksi Pajak	.126	.061	.163	2.072	.041	.946	1.057

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 16

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y \text{ (kepatuhan wajib pajak)} = -0,042 + 0,183X_1 + 0,057X_2 + 0,166X_3 + 0,058X_4 + 0,260X_5 + 0,126X_6 + e$$

- 1) Konstanta sebesar -0,042 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar -0,042.
- 2) Hasil regresi X_1 menunjukkan variabel tingkat penghasilan sebesar 0,183 yang menyatakan bahwa apabila tingkat penghasilan mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,183.
- 3) Hasil regresi X_2 menunjukkan variabel persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional sebesar 0,057 yang menyatakan bahwa apabila variabel persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) akan mengalami peningkatan sebesar 0,057.
- 4) Hasil regresi X_3 menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,166 yang menyatakan bahwa apabila pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) akan mengalami peningkatan sebesar 0,166.
- 5) Hasil regresi X_4 menunjukkan variabel tingkat pendidikan sebesar 0,058 yang menyatakan bahwa apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,058.

- 6) Hasil regresi X_5 menunjukkan variabel lingkungan sosial sebesar 0,260 yang menyatakan bahwa apabila lingkungan social mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,260.
- 7) Hasil regresi X_6 menunjukkan variabel sanksi pajak sebesar 0,126 yang menyatakan bahwa apabila sanksi pajak mengalami peningkatan 1 poin sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,126.

4.2.3.1 Uji Secara Parsial (Uji T)

1. Variabel Tingkat Penghasilan

H1 : tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $2,279 > t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,025 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Variabel Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional.

H2 : Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $1,067 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,289 > = 0,05$. Hasil ini

menunjukkan bahwa H2 ditolak dan persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan..

3. Variabel Pengetahuan perpajakan

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $2,121 > t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,037 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H3 diterima dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan..

4. Tingkat Pendidikan.

H4 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $0,656 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,514 > = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H4 ditolak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

5. Lingkungan Sosial.

H5 : Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $4,598 > t$ tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa $H5$ diterima dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

6. Sanksi Pajak.

H6 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $2,072 > t$ tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,041 < = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa $H6$ diterima dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

4.2.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

H7 : Tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan social, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau terikat. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F. Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel IV.10.

Tabel IV.10 Hasil Uji F Hitung

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132.101	6	22.017	12.861	.000 ^a
	Residual	159.209	93	1.712		
	Total	291.310	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 16

Pada Tabel IV.14 hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $12,861 > F$ tabel sebesar 2,198, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,00 < = 0,05$ maka hipotesis diterima. Maka model regresi menunjukkan bahwa H7 di terima dan secara bersama-sama tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan social, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

4.2.3.3 Analisis Korelasi Ganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah antara 0,00–0,199 adalah sangat rendah, antara 0,20-0,399

adalah rendah, 0,40-0,599 adalah sedang, 0,60-0,799 adalah kuat dan antara 0,80-1,0 adalah sangat kuat.

Tabel IV.11 Hasil Analisis Korelasi Ganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.673 ^a	.453	.418	1.308	1.801

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R sebesar 0,673. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan social, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.3.4 Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada Tabel IV.12 berikut :

Tabel IV.12 Hasil Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.673 ^a	.453	.418	1.308	1.801

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 16

Tabel IV.12 menunjukkan nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,453 yang artinya 45,3% dari variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dipengaruhi oleh variabel independen (tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, sanksi pajak). Atau variabel independen yang digunakan dalam model tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, sanksi pajak) mampu menjelaskan sebesar 45,3% variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Sedangkan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain seperti persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, database (Hutagaol, et al, 2007), sikap wajib pajak pada pelaksanaan denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan (Jatmiko, 2006)

4.3 Pembahasan

1. Tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan tingkat penghasilan, yaitu t hitung $2,279 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,025$ berada dibawah $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjar O.P. Siahaan (2007) yang menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kepatuhan *tax professional* dalam menyusun laporan pajak badan dan penelitian Khusnul Chotimah (2007) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Tapi hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda, MSi dikutip dari antaranews.com, yang mengatakan bahwa semakin Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, ternyata tingkat kepatuhan untuk membayar pajak justru semakin rendah.

2. Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, yaitu $1,067 < t \text{ tabel } 1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,289 berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Dewinta (2012) yang menunjukkan persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga tidak mendukung pernyataan dari Maria Karanta, *et al* (2000) dalam Suryadi (2006) dalam Dewinta (2012) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula persepsi positif masyarakat tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk patuh atau taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, didapat beberapa point yang menjelaskan bahwa wajib pajak tidak terlalu mengenal pelaksanaan sensus pajak nasional, form dan proses yang yang rumit serta kegiatan sensus pajak nasional yang dirasakan mengganggu kegiatan wajib pajak. Hal ini bisa disadari karena pelaksanaan sensus pajak nasional yang relatif masih baru yaitu dimulai pada tahun 2011 dan wajib pajak ataupun calon wajib pajak belum terlalu mengetahuinya. Diharapkan kedepannya Dirjen Pajak untuk lebih mensosialisasikan

pelaksanaan sensus pajak nasional serta apa-apa saja manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari pelaksanaan sensus tersebut.

3. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, yaitu $t \text{ hitung } 2,121 < t \text{ tabel } 1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,037 berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Supriyati dan Nurhidayati (2008) yang menyatakan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Gardina dan Haryanto (2006) dalam Supriyati dan Nurhidayati (2012) yang menyatakan ada perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak. Sebagian besar pengetahuan pajak didapat dari petugas pajak, radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Langkah ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Bertambahnya wawasan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara..

4. Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan tingkat pendidikan, yaitu t hitung $0,656 < t$ tabel 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,514 berada diatas 0,05. Hal Ini menunjukkan tingkat pendidikan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Muhammad dan Sri Suranta (2006) dalam Sri Rustiyaningsih (2011) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Surakarta. Hal ini disebabkan responden merasa kurangnya penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor melalui pendekatan ekonomi eksperimental sebagaimana disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda MSi, bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak.

Sementara penelitian ini bertentangan dengan penelitian Priyanti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak (kepatuhan wajib pajak) dan juga penelitian Zulia Hanum (2010) dalam Priyanti (2013) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan

(kepatuhan wajib pajak pajak) yang lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

5. Lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan lingkungan sosial, yaitu t hitung $4,598 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,000$ berada dibawah $0,05$. Hal Ini menunjukkan lingkungan sosial secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santi (2012) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Daroyani (2010) dalam Santi (2012) yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan lingkungan yang positif seperti proses pelaporan pajak yang mudah dimengerti, formulir yang tidak rumit, mendapat anjuran atau pembelajaran dari seseorang yang professional seperti petugas pajak, dan pengharapan serta tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang-orang sekitar maupun komunitas wajib pajak sehingga menjadi wajib pajak yang patuh.

6. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan sanksi pajak, yaitu t hitung $2,072 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,041$

berada dibawah 0,05. Hal Ini menunjukkan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Arum (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Dan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Arum, 2012).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran umum. Dari definisi diatas dapat diketahui pajak adalah salah satu unsur pendapatan Negara yang berfungsi membiayai pengeluaran umum pemerintahan.

Pengeluaran umum pemerintahan secara umum terbagi 2, pertama pengeluaran rutin, adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaran roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi Daerah dan subsidi Harga Barang), Angsuran dan Bunga Utang Pemerintah serta jumlah pengeluaran yang lainnya. 2 pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Untuk membiayai semua pengeluaran tersebut diambil dari alokasi APBN.

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Pajak Nasional, 2005-2012**(dalam miliar rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Proporsi Penerimaan Pajak
2005	347.031,1	298.400,0	85,98 %
2006	409.203,0	358.200,0	87,53 %
2007	490.988,6	426.230,0	86,81 %
2008	658.700,8	571.100,0	86,70 %
2009	725.843,0	565.770,0	77,94 %
2010	743.325,9	649.042,0	87,31 %
2011	878.700,0	872.600,0	99,30 %
2012*	1.016.000,0	702.000,0	69,09 %

Sumber : www.pajak.go.id dan [APBN](#) 2005-2012

*APBN tahun 2012 semester kedua

Dari tabel diatas dapat dilihat mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2012 pendapatan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun kita akui, dari tahun tahun ketahun penerimaan pajak belum maksimal dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang dikutip dari Pajak.com, “Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Dari 55 juta wajib pajak pribadi, baru 9 juta yang taat membayar pajak. Berarti masih 40-an juta yang belum membayar pajak. Adapun wajib pajak badan, dari 12 juta, baru 500 ribu yang membayar pajak”.

Hal ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah selaku pemungut dan pengelola pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak agar bisa memaksimalkan potensi yang ada supaya bisa menunjang keberhasilan target perpajakan yang telah ditetapkan. Untuk diketahui dalam APBN-P tahun 2012 pendapatan pajak ditargetkan lebih kurang 70% dari total APBN-P tahun 2012

sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah) (UU No. 22 Tahun 2011). Ini tentu bukanlahlah sesuatu yang mudah untuk dicapai dikarenakan semester pertama tahun berjalan 2012 pendapatan perpajakan yang diterima seperti yang terlihat pada tabel diatas baru mencapai Rp 456,776 triliun dari target Rp 1.032,570 triliun lebih.

Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya tersebut seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah mahasiswa/i sebagai pembayar pajak masa depan dan agen penyebar informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak menjadi orang yang menikmati hasil pembangunan tetapi tidak membayar pajak (Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi dikutip dari antaranews.com).

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2011 juga melaksanakan sensus pajak nasional yang mempunyai tujuan untuk memperluas dan mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sensus ini dilakukan dari rumah ke rumah, perusahaan ke perusahaan oleh petugas pajak yang telah ditunjuk untuk memeriksa wajib pajak. Pengawasan ini diperlukan supaya wajib pajak tetap patuh membayar pajak dimana sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan *self assessment system* sangat memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yang akhirnya akan mengurangi pendapatan Negara.

**Tabel I.2 Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pekanbaru Tampan
(Jutaan Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Proporsi Penerimaan Pajak
2009	438,760	462,264	105,35 %
2010	585,803	534,761	91,28 %
2011	650,840	713,876	109,68 %
2012*	711,678	664,900	93,42 %

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

*Realisasi pendapatan pajak semester kedua

Dari penyampaian diatas dapat disimpulkan untuk wilayah kota pekanbaru khususnya kecamatan Tampan pendapatan pajak sangat memuaskan karena dua tahun bisa melebihi target yang dicapai sehingga membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal-hal apa saja yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengambil variabel independen secara acak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah tempat dilakukannya penelitian dimana penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan serta subjek penelitian yang menggabungkan antara wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Dalam penelitian ini juga ditambahkan dua variabel baru yaitu Sensus Pajak Nasional dan lingkungan sosial berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan dari Penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Lingkungan**

Sosial dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”

1.2 Perumusan masalah

1. Apakah tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk dalam membayar pajak ?
2. Apakah Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
4. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
5. Apakah lingkungan sosial wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
6. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh lingkungan sosial wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
6. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menjadi masukan bagi Dirjen Pajak dalam mengoptimalkan baik jumlah wajib pajak terdaftar maupun pendapatan pajak yang akan datang.
2. Untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai fungsi dan kegunaan pajak secara lebih terperinci.
3. Memberikan edukasi (pendidikan) kepada masyarakat selaku subjek pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan serta peraturan perpajakan terbaru.
4. Menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) dan menjadi acuan untuk pengembangan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak dalam pandangan Islam, penelitian terdahulu, model penelitian, hipotesis dan variabel penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data. Variabel dan pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Ada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman perpajakan

2.1.1 Pengertian pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Leroy Beaulieu, seorang sarjana dari Perancis dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906 mengemukakan “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.
2. Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), mendefinisikan pajak sebagai bantuan uang secara incidental atau secara periodic (tanpa kontra-prestasinya) yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara) untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan) karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

3. Prof. Dr. P.J.A Adriani mengatakan “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
4. Anderson, W.H. (Puspaningrum, 2011:11) “Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government”. (Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah).

Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi financial (budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan kepentingan seluruh masyarakat.

2. Fungsi mengatur

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam menyusun undang-undang senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

Selain yang diatas, dikenal fungsi pajak dengan istilah The Four “R”s. The Four “R”s adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh Negara, yaitu:

1. Revenue (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi budgeter adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Saat ini hamper 70% pendapatan Negara kita disumbang oleh pajak, dimana hal ini menunjukkan dominasi pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

2. Redistribution (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh Negara, selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah Indonesia. Ini akan menghapus kesenjangan sosial yang selama terjadi dimana pajak dipungut oleh Negara untuk selanjutnya dikembalikan kepada masing-masing daerah secara merata.

3. Repricing (Pengaturan harga)

Fungsi ini menggunakan pajak sebagai alat pengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan,

dan keamanan. Contoh nyata dari fungsi ini yaitu dikenakan pajak pada komunitas minuman keras dengan tujuan mengurangi konsumsi masyarakat atas minuman keras.

2.1.3 Sistem pemungutan pajak

Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri:

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) wajib pajak bersifat pasif
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri:

- 1) Wewenang menghitung besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

With Holding System

Sistem yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus, bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.4 Asas pemugutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Tata cara pemungutan pajak

Tata cara pemungutan pajak merupakan segala ketentuan yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Di dalam tata cara pemungutan pajak berisi stelsel pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

berdasar objek (penghasilan yang nyata), pemungutan baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak, setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pada stelsel ini pajak dikenakan lebih realistis, tapi pengenaannya baru dapat dikenakan di kenakan di akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Berdasar suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misal, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah ditetapkan besarnya pajak terhutang untuk tahun pajak berjalan. Tapi sayangnya pajak yang dibayarkan tidak berdasar keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran Kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan.

Pada awal tahun pajak dihitung berdasar satu tahun anggapan, lalu pada akhir tahun dilakukan penyesuaian menurut keadaan sebenarnya.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, organisasi (Gibson et al dalam Kamila, 2010)

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena kepatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya untuk menghindarkan pajak seperti tax evasion dan tax avoidance yang menyebabkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Sofyan, 2005)

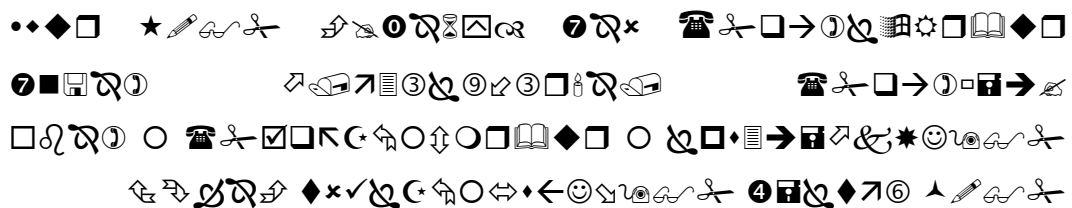
Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk pejabat publik atau keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja dan etika, ditekankan masalah internal dilingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi berbagai peraturan (Hutagaol:2007).

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif Wajib Pajak jika mereka paham betul atas isi Undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Menurut Devi dan Kautsar (2011) dalam Anggraini (2012) tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar Pajak.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan perpajakan yang berlaku di suatu Negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di Negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak

Alasan kaum muslim menunaikan Pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban Zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah:195



dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

kewajiban bagi kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan Zakat dan Pajak sekaligus.

2.4 Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan	Sumber
1	Annisa Nirmala Santi	Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)	1. Kepatuhan pajak (dependen) 2. Kesadaran perpajakan 3. Sikap rasional 4. Lingkungan 5. Sanksi denda 6. Sikap fiskus	-	Persamaan 1. Menggunakan variable yang sama yaitu lingkungan Sosial Perbedaan 1. Tempat penelitian yang berbeda	Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
2	Ellen Silvia Priyanti	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak Penghasilan Pada Kota Bangkinang	1. Kemauan membayar pajak (dependen) 2. Kesadaran 3. Pemahaman tentang peraturan perpajakan 4. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 5. Tingkat pendidikan	1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak 2. Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak 3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak 4. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak	Persamaan 1. Menggunakan variable yang sama yaitu tingkat pendidikan Perbedaan 1. Tempat penelitian yang berbeda	Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3	Supriyati, Nur Hidayati	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan wajib pajak (dependen) 2. Pengetahuan tentang pajak 3. Persepsi tentang petugas pajak 4. Persepsi criteria kepatuhan wajib pajak	1. Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Persepsi tentang petugas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Persepsi criteria kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan 1. Menggunakan variable yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak. Perbedaan 1. Sampel dan tempat penelitian yang	Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7, No. 1

					berbeda	
4	Harjanti Puspa Arum	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak (dependen) 2. Kesadaran wajib pajak 3. Pelayanan fiskus 4. Sanksi pajak 	-	<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variable yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang berbeda 	Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
5	Susi Susana	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Parsitipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi (dependen) 2. Kesadaran 3. Pendidikan 4. Pelayanan jasa 5. Pendapatan 6. Sanksi 	-	<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variable penelitian yang sama yaitu pendapatan <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel dan tempat penelitian yang berbeda 	Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6	Rinta Mulia Dewinta	Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak (dependen) 2. Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional 3. Kesadaran perpajakan 	-	<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variable penelitian yang sama yaitu persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel dan tempat penelitian yang berbeda 	Skripsi Universitas Diponegoro Semarang

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda, MSi dikutip dari antaranews.com, juga mengatakan bahwa semakin Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, ternyata tingkat kepatuhan untuk membayar pajak justru semakin rendah. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel yaitu faktor pemeriksaan terhadap WP, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan WP.

Hasil penelitian Fadjar O.P. Siahaan (2007) menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kepatuhan *tax professional* dalam menyusun laporan pajak badan. Hasil Penelitian Khusnul Chotimah (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

H1 : Berdasarkan dari penjelasan diatas diduga tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.5.2 Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara dengan mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bekerja sama dengan pihak lain.

Dari data diatas, dapat disimpulkan Sensus Pajak Nasioanal erat kaitannya dengan pemeriksaan pajak, atau bisa dikatakan pengembangan lebih lanjut dari pemeriksaan pajak dimana sama-sama mempunyai fungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indonesia mulai tahun 1983 menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Selain itu dikenal juga *withholding taz system* dimana pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Sri Rustiyaningsih, 2011). Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak

serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Untuk menjaga wajib pajak tetap dalam koridor peraturan perpajakan, maka dapat diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

H2 : Berdasarkan dari penjelasan diatas diduga Sensus Pajak Nasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.5.3 Pengetahuan pajak

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna (www.wikipedia.org:30/07/12)

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan pengetahuan pajak adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang mengenai perpajakan yang dalam hal ini yaitu peraturan perpajakan baik pendaftaran, tatacara pelaksanaan, sanksi, maupun hukum pajak.

Kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak; serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006 dalam Supriyati dan Nur hidayati, 2008). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan pelatihan pajak namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu pada tataran pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi belum tersosialisasi secara menyeluruh kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur hidayati, 2008)

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana

Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

H3 : Berdasarkan dari penjelasan diatas diduga pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.5.4 Tingkat Pendidikan

Secara teori, tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan membuat masyarakat lebih mudah dalam memahami ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban karena kurangnya pemahaman mereka terhadap system perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian Muhammad dan Sri Suranta (2006) dalam Sri Rustiyaningsih (2011) menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Surakarta. Hal ini disebabkan responden merasa kurangnya penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan.

Hal ini juga diteliti oleh Institut Pertanian Bogor melalui pendekatan ekonomi eksperimental sebagaimana disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda MSi, bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka semakin

lihai pula caranya untuk menghindari pajak
(www.medanbisnisdaily.com:30/7/12).

H4 : Berdasarkan dari penjelasan diatas diduga tingkat pendidikan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.5.5 Lingkungan Sosial

Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Daroyani, 2010).

Kidder dan McEwen (1989) dalam Daroyani (2010) melalui penelitian dan teori teori literatur mengidentifikasi enam variabel yang mendukung penyebab *compliance* dan *non compliance* WP yaitu koersi/ancamannya, kepentingan diri sendiri, kebiasaan legitimitasi dan transparansi, tekanan sosial dan informal, dan tingkat pengetahuan tentang peraturan. Keenam variabel ini berbaur dengan dominasinya masing-masing secara rumit untuk membentuk sosial yang berkaitan dengan tipe-tipe *compliance* dan *non compliance* WP.

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance*. Tipe-tipe lingkungan yang *compliance* tersebut yang

pada akhirnya membuat WP patuh untuk tidak dapat dijelaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010):

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti, pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.
2. *Brokered compliance*, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Indikator lingkungan WP berada ditunjukkan dengan:

1. Masyarakat atau lingkungan
2. Perekonomian
3. Prosedur pelaporan

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.

H5 : Berdasarkan dari penjelasan diatas diduga lingkungan sosial wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.5.6 Sanksi Perpajakan

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing Pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan.

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2009:57) adalah sebagai berikut :

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.”

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada Negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang

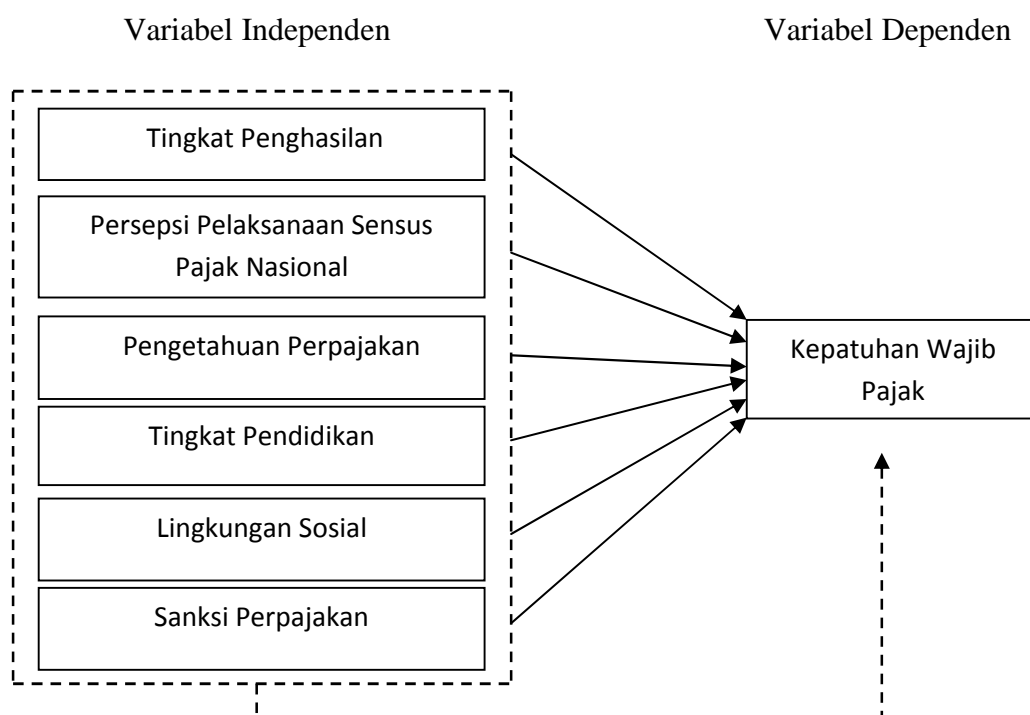
telah diatur dalam ketentuan material.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak.

H6 : Berdasarkan dari penjelasan diatas diduga tingkat sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.6 Model Penelitian

Gambar II.1 Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu dari Kabupaten di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Telayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, dan Sukajadi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Apa pun Populasi dari penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007 :90).

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak terdaftar baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha didalam wilayah administrasi kecamatan Tampan.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono : 2007 : 91)

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan yaitu Probability sampling dengan metode simple random. Hal ini dipilih dikarenakan homogennya jumlah populasi yang ada baik dari tingkat pendidikan maupun jenis pekerjaan. Sedangkan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Adapun rumus Slovin tersebut adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai Kritis (Batas Ketelitian) Yang Dinginkan

Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.

Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi.

Adapun jumlah populasi atau wajib pajak pribadi dan badan sekecamatan tampan dari penelitian ini sebesar 22.671 jiwa , maka dengan besar jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 10% (0,01) dari populasi yang berjumlah 22.671 jiwa terdapat sampel sebanyak :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{22.671}{1+22.671(0,01)}$$

$$n = \frac{22.671}{227,71} = 99,56 = 100 \text{ orang.}$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 22.671 jiwa adalah sebanyak 100 jiwa wajib pajak yang berdomisili di kecamatan tampan.

3.3 Jenis Penelitian Dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan. Responden dari peneliiian ini yaitu wajib pajak yang mempunyai penghasilan di atas PTKP yang menjadi subjek pajak. Data tersebut diantaranya :

- a) data tentang responden
- b) data tentang pembayaran atau kesediaan membayar pajak.

3.3.2 Data Sekunder

Data yang penulis peroleh dari kantor-kantor yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kantor tersebut adalah kantor pelayanan pajak pratama tampan, kantor camat kecamatan tampan, data-data yang dimaksud adalah:

- a) Lokasi penelitian
- b) Data wajib pajak terdaftar
- c) Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat
- d) Jumlah penduduk
- e) Keadaan sarana dan pra sarana
- f) Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2007 : 166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan jadi observasi merupakan teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian objek penulis

2. Interview

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Kuesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan data yang dicari.

3.5 Definisi Variabel Dan Pengukuran Variabel Operasional

Mudrajat, (2003 : 123), menyatakan bahwa variabel adalah suatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Data penelitian terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui kuensioner. Yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y) dan variabel Independennya adalah tingkat penghasilan (X1), Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional (X2), pengetahuan perpajakan (X3), tingkat pendidikan (X4), lingkungan sosial (X5) dan sanksi perpajakan (X6).

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, organisasi (Gibson et al dalam Kamila, 2010)

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah UU No. 16 Tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK 235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3.5.2 Variabel Independen (X)

a. Tingkat Penghasilan (X1)

Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode. Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya

Untuk mengukur seberapa besar tingkat penghasilan (X1) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

b. Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X2)

Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional merupakan pandangan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia (Dewinta, 2012)

Untuk mengukur seberapa besar Sensus Pajak Nasional (X2) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

c. Pengetahuan Perpajakan (X3)

Pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Supriyati dan Nur hidayati,

2008). Untuk mengukur seberapa besar pengetahuan perpajakan (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

d. Tingkat Pendidikan (X4)

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan (kepatuhan wajib pajak) yang dimiliki lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah (Zulai Hanum, 2010 dalam Silvia, 2013).

Untuk mengukur seberapa besar tingkat pendidikan (X4) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

e. Lingkungan Sosial (X5)

Tipe lingkungan sosial yang non compliance dimana WP berada ditunjukkan dengan perhatian masyarakat terhadap ketidakpatuhan WP dan kebiasaan masyarakat itu sendiri terhadap memenuhi kewajibannya (Santi, 2012).

Untuk mengukur seberapa besar lingkungan sosial (X5) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

f. Sanksi Perpajakan (X6)

Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Dan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Arum, 2012). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Untuk mengukur seberapa besar sanksi perpajakan (X6) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Uji Validitas Dan Realibilitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut Azwar, (2005:5) “validitas adalah sejauh mana kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya”. Instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Oleh karena itu angket yang digunakan perlu diuji validitasnya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur data dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini mengetahui validitas angket dengan menggunakan rumus *product moment* atau *bivariate Pearson*.

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (di nyatakan valid), sebaliknya bila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total / dinyatakan tidak valid.

3.6.1.2 Uji Realibilitas

Untuk mengetahui konsistensi alat ukur dilakukan uji reliabilitas. Angket dikatakan reliabel apabila dapat memberikan hasil yang relatif sama saat dilakukan pengukuran ulang pada obyek yang berbeda pada waktu yang berlainan. Pegujian reliabilitas angket menggunakan rumus metode alpha.

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikan 5% (0,05), artinya instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis *product moment*. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2003: 110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametrik *kolmogorovsmirnov (K-S)*. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati & Kutner , Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Jelas bahwa multikolinieritas adalah suatu kondisi yang menyalahi asumsi regresi linier. Tentu saja, multikolinieritas tidak mungkin terjadi apabila variabel bebas (X) yang diikutsertakan hanya satu.

Ciri-ciri yang sering ditemui apabila model regresi linier kita mengalami multikolinieritas adalah:

1. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi (misal nilainya menjadi lebih besar atau kecil) apabila dilakukan penambahan atau pengeluan sebuah variabel bebas dari model regresi.
2. Diperoleh nilai R-square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial.
3. Tanda (+ atau -) pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang disebutkan dalam teori (atau logika). Misal, pada teori (atau logika) seharusnya b_1 bertanda (+), namun yang diperoleh justru bertanda (-).
4. Nilai standard error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya (overestimated).

Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikolinieritas, dapat diperiksa menggunakan VIF. VIF merupakan singkatan dari Variance Inflation Factor. Nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikolinieritas yang serius di dalam model regresi kita.

3.6.2.3 Uji Heterokedestistik (Uji Park)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji park untuk melakukan uji Heterokedestistik. Park mengemukakan metode bahwa variance (S^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$S^2_i = X_i$$

Persamaan ini dijadikan linear dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi :

$$\ln U^2_i = \alpha + \ln X_i + v_i$$

Karena S^2_i umumnya tidak diketahui maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_i sebagai proksi, hingga persamaan sebagai berikut :

$$\ln U_i^2 = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 yang lazim digunakan dalam penelitian pada ilmu-ilmu sosial.

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Metode Regresi Linear Berganda

Adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih dari variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan antara variabel independen atau dependen berhubungan positif atau negatif. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 +$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel dependen)

X_1 = Tingkat Penghasilan

X_2 = Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

X_3 = Pengetahuan Perpajakan

X_4 = Tingkat Pendidikan

X_5 = Lingkungan Sosial

X_6 = Sanksi Perpajakan

= Konstanta

= Koefisien Regresi

= Error Term

3.6.3.2 Uji T

Menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Kriteria pengujian adalah H_0 diterima apabila t hitung $<$ t tabel. H_a diterima apabila t hitung $>$ t tabel. Kategori yang digunakan berdasarkan skala likers, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban sebagai berikut :

Alternatif SS (Sangat Setuju 5)

Alternatif S (Setuju 4)

Alternatif RG (Ragu-ragu 3)

Alternatif TS (Tidak Setuju 2)

Alternatif STS (Sangat Tidak Setuju 1).

3.6.3.3 Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). (Dwi Priyanto, 2009 : 81)

Dalam Uji F kesimpulan yang diambil adalah yang melihat signifikan () 5% dengan ketentuan :

$F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a tolak : independen tidak berpengaruh secara simultan kepada dependen.

$F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima : independen berpengaruh secara simultan kepada dependen.

3.6.3.4 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase.

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan tingkat penghasilan, yaitu $t \text{ hitung } 2,279 > t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,025 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, yaitu $t \text{ hitung } 1,067 < t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,289 berada diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan pengetahuan perpajakan, yaitu $t \text{ hitung } 2,121 > t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,037 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan tingkat pendidikan, yaitu $t \text{ hitung } 0,656 < t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai

signifikansi probabilitas sebesar 0,514 berada diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan lingkungan sosial, yaitu t hitung $4,598 > t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan sanksi pajak, yaitu t hitung $2,072 > t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,041 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Secara Simultan (Uji F), nilai F hitung sebesar $12,861 > F$ tabel 2,198. Dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 Berada di bawah 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan social, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Nilai R sebesar 0,673, ini menunjukkan bahawa terjadi hubungan yang kuat antara tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan social, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Dan nilai R square pada penelitian ini adalah 0,453 atau 45,3% Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh variable independen (tingkat penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, lingkungan social, dan sanksi pajak) mampu menjelaskan sebesar 45,3% variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sedang sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain seperti pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, persepsi tentang petugas pajak dan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak diharapkan terus untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak karena seperti yang kita ketahui pajak merupakan penyumbang persentase terbesar dalam pendapatan negara. Dan pembangunan negara sangat tergantung pada jumlah pajak yang dibayar masyarakat pada negara.
2. Dirjen Pajak supaya lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan sensus pajak nasional dengan membuat proses yang tidak terlalu rumit dan mudah dimengerti oleh masyarakat serta tidak menyita waktu sehingga diharapkan semakin efektifnya pelaksanaan sensus pajak nasional maka semakin banyak menjaring wajib pajak baru yang secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

3. Dirjen Pajak untuk bisa lebih giat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengadakan sosialisasi dan pembelajaran tentang perpajakan ke peserta didik sedini mungkin sehingga diharapkan semakin dini seseorang mengerti tentang pajak maka akan semakin tahu tentang kegunaan pajak dan bisa menjadi wajib pajak yang patuh.
4. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Romandana (2012) *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. <http://katalog.library.perbanas.ac.id/>, Diakses 16 Juli 2012.
- Arum, Harjanti Puspa (2012) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Chusnul Chotimah (2007) *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survey Kota Klaten)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Daroyani, Inge Viyulita. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Metode Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu (2006) *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dewinta, Rinta Mulia (2012) *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
- Fadjar O.P. Siahaan (2007) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdls3-2007-siahaanfad-3620>, Diakses 29 Juli 2012
- Fidel (2010) *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, Imam, (2006) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hutagaol, John, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta (2007) *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntabilitas Vol. 6 No. 2 (Jan) hal. 8-13.
- Jatmiko, Agus Nugroho, (2006) *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Thesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Kamila, Ichwanul (2010) *Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta*. Skripsi Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta. <http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=22109>, Diakses 18 Juli 2012.

Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo (2009) *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.

Non-Personal (2010) *Pendidikan Berbanding Terbalik dengan Kepatuhan Bayar Pajak*. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/09/25/1394/pendidikan_berbanding_terbalik_dengan_kepatuhan_bayar_pajak/#.UBVPYuEOOE8, Diakses 29 Juli 2012.

economy.okezone.com/read/2013/06/10/20/819421/redirect. Diakses 17 Juli 2013

Pris K, Andarini (2010) *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Thesis, Universitas Diponegoro Semarang. http://eprints.undip.ac.id/22599/1/ANDARINI_PRIS_K.PDF, Diakses 18 Juli 2012.

Priyanti, Ellen Silvia (2013) *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak Penghasilan Pada Kota Bangkinang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Purwono, Herry (2010) *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Puspaningrum, Mona Ajeng (2011) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pajak Penghasilan Pada Wajib Badan di Indonesia*. Proposal Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.

Rustiyaningsih, Sri (2011) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak*. Widya Warta No. 2 Tahun XXXV. [http:// portal.widyamandala.ac.id/](http://portal.widyamandala.ac.id/), Diakses 29 Juli 2012.

Santi, Anisa Nirmala (2012) *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.

Sofyan, Marcus Taufan (2005) *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/380/jbptunikompp-gdl-berrynurdi-18969-7-pengaruh-t.pdf>, Diakses 16 Juli 2012.

Sugiyono, (2007) *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas (2012) *Sensus Pajak Nasional, Siapa Takut ?*. Jakarta Barat: PT Indeks.

Supriyanti dan Nur Hidayati (2008) *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7 No. 1, pp. 42.

Susi Susana (2012) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Parsitipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Syafputri, Ella (2012) *Ditjen Pajak Ajak Mahasiswa Peduli Pajak*. <http://www.antaraneews.com/berita/324566/ditjen-pajak-ajak-mahasiswa-peduli-pajak>, Diakses 01 Agustus 2012.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<http://www.antaraneews.com/print/1285312862>, Diakses 17 Juli 2013

www.fiskal.depkeu.go.id, Diakses 30 Juli 2012.

www.pajak.go.id, Diakses 25 Juli 2012.

www.wikipedia.org, Diakses 30 Juli 2012.